



**PEMERINTAH KOTA
PADANG PANJANG**

**LAMPIRAN IV
PERATURAN WALIKOTA NO 13 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026**

BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

DAFTAR ISI

Bab I. PENDAHULUAN	3
1.1 Latar Belakang	3
1.2 Landasan Hukum	6
1.3 Maksud dan Tujuan	7
1.4 Sistematika Penulisan	8
Bab II. HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024.....	10
2.1 Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKD Tahun 2024-2026	10
2.2 Evaluasi terhadap kinerja keuangan	18
2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	22
2.4 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah	24
2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD.	28
2.6 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang	28
2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	30
Bab III. TUJUAN DAN SASARAN BPKD	41
3.1 Telaah Terhadap Kebijakan Nasional	41
3.2 Tujuan dan Sasaran Renja BPKD	42
3.3 Program dan Kegiatan Renja BPKD	42
Bab IV. PENUTUP	81

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun 2025	11
Tabel 2.2 Rekapitulasi Hasil EValuasi Pelaksanaan Keuangan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024.....	19
Tabel 2.3 Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah	24
Tabel 2.4 Kelemahan, Kekuatan, Peluang dan Ancaman.....	25
Tabel 2.5 Pemetaan Permasalahan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah	26
Tabel 2.6 Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang.....	28
Tabel 2.7 Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026	30
Tabel 3.1 Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 dan Prakiraan Maju Tahun 2027.....	44
Tabel 4.1 Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah	54

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja Perangkat Daerah adalah dokumen Perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Berdasarkan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, proses penyusunan Renja Perangkat Daerah terdiri atas 6 (enam) tahapan yaitu tahap persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal, penyusunan rancangan, penyusunan forum Perangkat Daerah/lintas Perangkat Daerah, perumusan rancangan akhir, dan penetapan. Perangkat Daerah menyusun rancangan awal Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah dengan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun berjalan.

Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), diwajibkan bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun rencana kerja sebagai acuan dalam penyelenggaraan pembangunan, baik untuk jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan). Untuk perencanaan jangka menengah disusun dalam bentuk Rencana Strategis (Renstra), dan untuk perencanaan tahunan disusun dalam bentuk Rencana Kerja (Renja), sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 Ayat (11), yaitu “Rencana Pembangunan Tahunan Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja-SKPD), adalah dokumen perencanaan Satuan Kerja Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun”

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah disebutkan keterkaitan antara Renja dengan dokumen perencanaan lainnya, dimana dalam Pasal 273 ayat (2) disebutkan “Rencana Strategis Perangkat Daerah dirumuskan ke dalam rancangan Rencana Kerja Perangkat Daerah dan digunakan sebagai bahan penyusunan rancangan RKPD.” Renja Perangkat Daerah ini nantinya akan menjadi dasar dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) sebelum ditetapkan menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA).

Proses penyusunan rancangan awal Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026 didasarkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan daerah 2025-2029

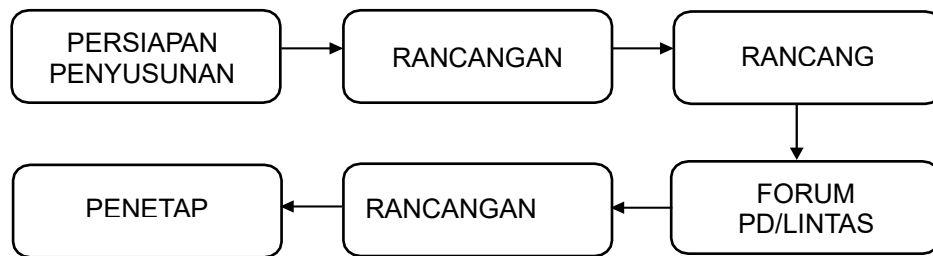
dengan memperhatikan program prioritas yang telah dituangkan dalam Ranwal RKPD Tahun 2026. Tahun 2026 merupakan tahun kedua perencanaan pembangunan Kota Padang Panjang yang berpedoman pada Renstra 2025 - 2029. Dokumen Renja Tahun 2026 disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah serta sejalan dengan tujuan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 yaitu :

1. Terwujudnya Pertumbuhan Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan;
2. Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani.

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dilakukan melalui tahapan, meliputi :

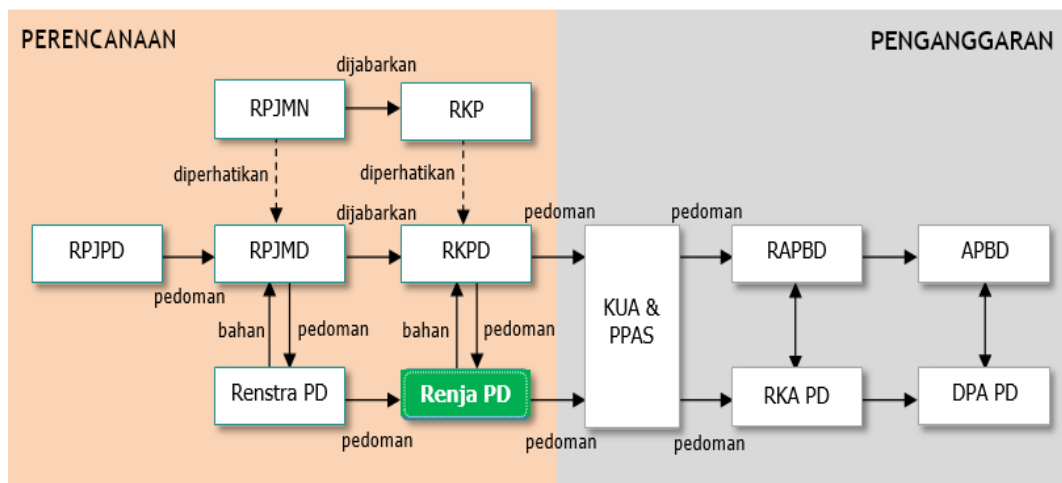
1. Persiapan penyusunan :
Meliputi pembentukan tim penyusun Renja PD Tahun 2026, Pengumpulan hasil evaluasi renja 2024, pengendalian kegiatan tahun 2025.
2. Tahap perumusan rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah, meliputi:
 - a. Pengolahan data dan informasi ;
 - b. Analisis gambaran pelayanan PD ;
 - c. Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun lalu berdasarkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - d. Isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah;
 - e. Telaahan terhadap rancangan awal RKPD;
 - f. Perumusan tujuan dan sasaran;
 - g. Penelaahan usulan program dan kegiatan dari masyarakat;
 - h. Perumusan kegiatan prioritas;
 - i. Penyajian awal dokumen rancangan Renja PD;
 - j. Penyempurnaan rancangan PD;
 - k. Pembahasan forum PD;
3. Penyusunan rancangan
Sinkronisasi dan dilaksanakan oleh Tim Penyusun Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2026, Masukan dari pelaksana kegiatan pembahasan oleh tim Badan Pengelola Keuangan Daerah;
4. Pelaksanaan forum Perangkat Daerah/Lintas Perangkat Daerah;
5. Tahap penyajian rancangan Renja Perangkat Daerah, sesuai dengan sistematika yang telah ditetapkan dalam bentuk rancangan akhir;
6. Tahap Penetapan Rencana Kerja Perangkat Daerah;

GAMBAR 1.1
Tahapan Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang



Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 adalah penjabaran dari Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025-2029, untuk melihat hubungan antar dokumen dapat kita lihat pada tabel berikut:

Gambar 1.2
Hubungan antar Dokumen terhadap Renja PD



1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 berlandaskan pada Peraturan Perundang-undangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 962);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2019 Nomor 1114);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 Tentang Laporan Dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 288);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2021 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Tahun 2021 Nomor 1419);
11. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2021-2026 (Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun 2022 Nomor 19);
12. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2009 Nomor 11 Seri E.6);
13. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah

Kota Padang Panjang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

14. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
15. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 2 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 Nomor);
16. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 13 Tahun 2025 tentang Rencana Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2026

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah untuk memberikan arah dan pedoman dalam penentuan program, kegiatan dan sub kegiatan Tahun 2026 dalam mendukung pencapaian tujuan dan sasaran secara berkesinambungan.

Adapun tujuan penyusunan Renja Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang adalah:

- a) Menjabarkan Tujuan, Sasaran, Program dan Kegiatan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsi Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Padang Panjang;
- b) Memberikan arahan dan panduan bagi peningkatan sumber-sumber pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah dalam jangka waktu satu tahun;
- c) Memberikan dasar penilaian kinerja penyelenggaraan tugas Badan Pengelolaan Keuangan Daerah dalam kurun waktu satu tahun;
- d) Sebagai Dasar penyusunan program dan kegiatan dalam KUA PPAS tahun 2026;
- e) Menetapkan kegiatan prioritas berdasarkan isu dan masalah yang mendesak agar lebih terarah.

1.4. Sistematika Penulisan

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

Memuat tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan, serta sistematika penulisan.

Bab II Hasil Evaluasi Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024

Mereview hasil evaluasi pelaksanaan Renja tahun lalu (2024) dan perkiraan capaian tahun berjalan (2025) serta keterkaitan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah berdasarkan realisasi program dan kegiatan pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun sebelumnya, analisis kinerja pelayanan, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah, review terhadap rancangan awal RKPD, serta penelaahan usulan program dan kegiatan masyarakat.

Bab III Tujuan Dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Memuat tentang telaahan terhadap kebijakan nasional, tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah, serta Program dan Kegiatan.

Bab IV Rencana Kerja Dan Pendanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Memuat Rencana Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan tahun n dan Perkiraan Maju tahun $n+1$

Bab V Penutup

Memuat tentang catatan penting yang perlu mendapat perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan, kaidah-kaidah pelaksanaan, serta rencana tindak lanjut.

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Tahun 2024 dan Capaian Renstra BPKD Tahun 2024-2026

Kualitas Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah yang disusun sangat berpengaruh terhadap kualitas rencana pembangunan daerah, yaitu untuk memastikan kesinambungan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan. Dalam menyusun Renja yang berkualitas diperlukan adanya evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya, dikaitkan dengan pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah. Tujuan dari evaluasi terhadap pelaksanaan Renja tahun sebelumnya dan pencapaian Renstra adalah untuk mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja serta mengidentifikasikan sejauh mana keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan juga hambatan.

Dalam melakukan penyusunan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026, perlu diperhatikan hasil evaluasi Renja Tahun 2024 berdasarkan capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024-2026, serta evaluasi terhadap proyeksi capaian Renja untuk tahun berjalan yaitu Tahun 2025. Evaluasi dilaksanakan dengan membandingkan proyeksi capaian akhir Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah sampai dengan tahun berjalan yaitu Tahun 2025 terhadap target kinerja Tahun 2025. Hal ini juga perlu dilihat hasil evaluasi terhadap capaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 dan kinerja Tahun 2024 .

2.1.1. Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Tahun 2024 dan Perkiraan Capaian Target sampai dengan Tahun 2025

Secara umum, pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024, dapat terlaksana sesuai dengan target rencana yang telah ditetapkan, dengan rata-rata realisasi fisik telah mencapai 100%. Begitu juga berdasarkan hasil rewiuw berdasarkan target renja yang telah ditetapkan dalam Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2024-2026 realisasi capaian kinerja mencapai 100%.

Secara lebih terperinci hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 dapat dilihat pada Tabel 2.1

Tabel 2.1
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dan
Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah s/d Tahun 2025
Kota Padang Panjang

Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/ Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra OPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Kegiatan Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target program dan kegiatan Renja Tahun 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Tahun 2025	
					Target Renja OPD tahun 2024	Realisasi Renja OPD Tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Tahun 2025	Tingkat Capaian Realisasi (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 = 7/6	9	10 =(5+7+9)	11=(10/4)
3 1	PENUNJANG URUSAN									
3 01 01	PERENCANAAN									
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100,00%		100,00%	100,00%	100,00%	100 Persen	100 Persen	100%
5 01 01 2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen	61,90%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	2058 Orang/bulan	-	644 Orang/bulan	644 Orang/bulan	100%	630 Orang/bulan	1274 Orang/bulan	61,90%
5 01 01 2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	-	-	45,91%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	98 Paket	-	45 Paket	45 Paket	100%	-	45 Paket	45,91%

5	01	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan adminstrasi umum perangkat daerah	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	66,67%
5	01	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	21 Paket	-	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	14 Paket		66,67%
5	01	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	135 Paket	-	45 Paket	45 Paket	100%	45 Paket	90 Paket		66,67%
5	01	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	24 Paket	-	8 Paket	8 Paket	100%	8 Paket	16 Paket		66,67%
5	01	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	1386 Laporan	-	462 Laporan	462 Laporan	100%	256 Laporan	718 Laporan		51,80%
5	01	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	-	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen		66,67%
5	01	01	2.07	0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	15 Unit	-	5 Unit	5 Unit	100%	5 Unit	10 Unit		66,67%
5	01	01	2.07	6	Pengadaan Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan dinas jabatan yang disediakan	3 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	3 Unit		66,67%
					Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	-	100%	100%	100%	100 Persen	100 Persen		100%
5	01	01	2.08		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	9 Laporan	-	3 Laporan	3 Laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan		66,67%
5	01	01	2.08	0001	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	180 Laporan	-	60 Laporan	60 Laporan	100%	60 Laporan	120 Laporan		66,67%

5	01	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	66,67 %
5	01	01	2.08	0004	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	-	100%	100%	100%	100%	100%	62,70%
5	01	01	2.09		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajaknya	99 Unit	-	23 Unit	23 Unit	100%	23 Unit	46 Unit	46,46%
5	01	01	2.09	0001	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	168 Unit	-	56 Unit	56 Unit	100%	56 Unit	112Unit	66,66%
5	01	01	2.09	0006	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	-	1 Unit	1 Unit	100%	1 Unit	2 Unit	50%
5	01	01	2.09	0009	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Penyusunan Produk anggaran yang tertib efisien dan tepat waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%
					Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	66,67%
5	01	01	2.09	0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
5	01	01	2.09	0008	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
5	01	01	2.09	0003	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala	18 Dokumen	-	6 Dokumen	6 Dokumen	100%	6 Dokumen	12 Dokumen	66,67%

		Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Daerah tentang Penjabaran APBD											
5	01	02	2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	12 Dokumen	-	4Dokumen	4Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	66,67%	
5	01	02	2.01	0005	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88 %	-	83 %	83%	100%	83 Persen	83 Persen	66,67%
5	01	02	2.01	0007	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
5	01	02	2.02		Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	Jumlah Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang Berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	6 Dokumen	-	0 Dokumen	0 Dokumen	100%	0 Dokumen	0 Dokumen	0%
5	01	02	2.02	0001	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Tepat Waktu	Tepat Waktu	66,67%
5	01	02	2.03		Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	12 Laporan	-	4 Laporan	4 Laporan	100%	4 Laporan	8 Laporan	66,67%

5	01	02	2.03	0003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	21 Laporan	-	7 Laporan	7 Laporan	100%	7 Laporan	14 Laporan	66,67%
5	01	02	2.04		Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
5	01	03			Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	-	100,00%	100,00%	100,00%	100 Persen	100 Persen	66,67%
5	01	03	2.01	0007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	3 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	2 Laporan	66,67%
5	01	03	2.01	0008	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Penyajian Laporan Barang Milik Daerah secara akurat dan tepat waktu	Tepat Waktu	-	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100 %	Tepat Waktu -	Tepat Waktu -	100%
5	01	03	2.02		Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	Tepat waktu	-	Tepat waktu	Tepat waktu	100 %	100 Persen	100 Persen	66,67%
5	01	03	2.02	0008	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	66,67%
5	01	03	2.03		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	6 Dokumen	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
5	01	03	2.03	0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	6 Laporan	-	6 Laporan	6 Laporan	100%	2 Laporan	8 Laporan	133,33%

5	05				Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	9 laporan	-	3 laporan	3 laporan	100%	3 Laporan	6 Laporan	66,67%
					Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	12 Dokumen	-	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	4 Dokumen	8 Dokumen	66,67%
5	05	02			Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	6 Laporan	-	2 Dokumen	2 Dokumen	100%	2 Dokumen	4 Dokumen	66,67%
					PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Persentase Peningkatan Pajak daerah dan Retribusi daerah	6,00%	-	2,00%	1,99%	98,8%	2 Persen	3.99 Persen	99%
5	05	02	2.01		Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah	29,7 M	-	9,9 M	9,7 M	97,9 %	9,9 Milyar	19,6 Milyar	66,02%
5	05	02	2.01	0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	27 Dokumen	-	9 Dokumen	9 Dokumen	100%	9 Dokumen	18 Dokumen	66,67%
5	05	02	2.02		Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	6 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	2 Laporan	4 Laporan	66,67%
5	05	02	2.02	0003	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	1250 Objek Pajak	-	400 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	100%	400 Obyek Pajak	800 Obyek Pajak	64%

5	05	02	2.03	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	216 dokumen	-	72 Dokumen	72 Dokumen	100%	72 Dokumen	144 Dokumen	66,67%
---	----	----	------	---	---	-------------	---	------------	------------	------	------------	-------------	--------

Berdasarkan Tabel 2.1 Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Badan Pengelola Keuangan Daerah dan Pencapaian Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah s/d Tahun 2025 Kota Padang Panjang diatas dapat dijelaskan bahwa Badan Pengelola Keuangan Daerah melaksanakan 1 urusan yang terdiri 4 Program, 11 Kegiatan dan 32 Sub kegiatan dengan rincian sebagai berikut:

- a. Program Penunjang urusan Pemerintah daerah/ Kota dengan target 98% terealisasi sebesar 100,79% berdasarkan Realisasi pencapaian
- b. Program Pengelolaan keuangan Daerah dengan target Tepat waktu terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan atau 100% berdasarkan realisasi pencapaian
- c. Program Pengeloaan Barang Milik Daerah sama halnya dengan Program Pengelolaan Keuangan daerah dengan target tepat waktu juga terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan yaitu Tepat waktu atau 100% secara realisasi Pencapaian
- d. Program Pengelolaan Pendapatan Daerah dengan Target Peningkatan Pendapatan Pajak dan Retribusi daerah sebesar 2% terealisasi sebesar 2,34% atau sebesar 117% secara realisasi Capaian

Hasil evaluasi pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah hingga tahun 2025 dapat dilihat bahwasanya seluruh Program dan kegiatan yang telah ditargetkan pada tahun 2024 hampir tercapai 100% secara keseluruhan namun ada 1 Program/ kegiatan yang tidak tercapai yaitu Program Pengelolaan Pendapatan Daerah/ kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah Dimana pada tahun 2024 kegiatan di targetkan 9,9 M terealisasi sebesar 9,7 M atau sebesar 97,9% secara persentase dan untuk program nya ditargetkan peningkatan 2% namun hanya terealisasi 1,99% atau 99% secara pencapaian .sedangkan untuk program dan kegiatan yang lain terealisasi sesuai dengan yang ditargetkan.

Faktor-faktor yang menjadi penyebab tidak tercapainya program / kegiatan pengelolaan pendapatan daerah adalah :

1. Kurangnya anggaran untuk pengawasan dan pelaksanaan yang memadai
2. Rendahnya kesadaran dan partisipasi Masyarakat sebagai wajib pajak sehingga pembayaran pajak tidak optimal
3. Perencanaan target yang kurang tepat atau indikator capaian kinerja yang kurang terukur

4. Keterbatasan dalam mengelola dan memaksimalkan potensi penerimaan dari sumber – sumber pendapatan daerah
5. Adanya keterlambatan atau perubahan dalam penagihan dan pembayaran pajak oleh wajib pajak

Implikasi yang timbul terhadap target capaian program renstra Adalah ketidak tercapaian target pendapatan daerah akan menimbulkan kendala pembiayaan program dan renstra, menurunkan kemandirian fiskal dan memaksa revisi strategi serta program agar tetap efektif dalam mendukung Pembangunan daerah

Kebijakan dan tindakan perencanaan serta penganggaran yang perlu diambil untuk mengatasi ketidak tercapaian target pengelolaan pendapatan daerah dan mendukung pencapaian renstra perangkat daerah Adalah :

1. Penyesuaian target realistik
2. Optimalisasi potensi pendapatan
3. Penguatan kapasitas SDM
4. Penguatan teknologi informasi
5. Peningkatan koordinasi dan sinergi

2.2 Evaluasi Terhadap Kinerja Keuangan

Evaluasi terhadap kinerja keuangan dilakukan berdasarkan pagu Anggaran Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024. Rincian dari pagu beserta realisasi Anggaran Perubahan Tahun 2024 dan anggaran tahun 2025 beserta perkiraan target realisasi anggaran disajikan pada tabel berikut :

Tabel 2.2

**Rekapitulasi Hasil Evaluasi Pelaksanaan Keuangan Badan Pengelola
Keuangan Daerah Tahun 2024**

Perangkat Daerah : Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan (Renstra 2024 - 2026)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2024			Target Anggaran program dan kegiatan (Renja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Rp)	Perkiraan Realisasi Capaian Anggaran Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan (2025)	
		Anggaran Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (Rp)	Realisasi Anggaran Perangkat Daerah tahun 2024	Tingkat Realisasi (%)		Target Renja Perangkat Daerah tahun 2025	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2025
1	2	3	4	5	6	7	8
5 01 01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	8.739.867.548	8.350.386.639	95,54%	7.944.832.069	7.944.832.069	100%
5 01 01 2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	6.326.497.975	5.967.130.985	94,32%	6.329.676.069	6.329.676.069	100%
5 01 01 2.02 0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	6.802.443.016	6.802.443.01	94,32%	6.329.676.069	6.329.676.069	100%
5 01 01 2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	-	-	-	31.500.000	31.500.000	100%
5 01 01 2.05 0002	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	31.500.000	31.500.000	100%
5 01 01 2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	693.165.553	741.211.144	106,93%	468.928.700	468.928.700	100%
5 01 01 2.06 0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan	7.558.253	6.487.000	85,83%	10.330.000	10.330.000	100%
5 01 01 2.06 0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	117.519.600	89.673.455	76,31%	116.752.400	116.752.400	100%
5 01 01 2.06 0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	25.921.850	19.195.500	74,05%	13.514.300	13.514.300	100%
5 01 01 2.06 0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	542.165.850	625.855.189	115,44%	328.332.000	328.332.000	100%

5 01 01 2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	205.235.260,0	100%	85.446.000	85.446.000	100%
5 01 01 2.07 0005	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	205.235.260	100%	85.446.000	85.446.000	
5 01 01 2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	699.936.400	581.819.116	83,12%	685.873.600	685.873.600	100%
5 01 01 2.08 0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	6.100.000	3.320.000	54,43%	4.385.200	4.385.200	100%
5 01 01 2.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	163.710.000	127.042.340	77,60%	161.662.000	161.662.000	100%
5 01 01 2.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	530.126.400	451.456.776	85,16%	519.826.400	519.826.400	100%
5 01 01 2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	344.581.040	392.053.338	113,78%	343.407.700	343.407.700	100%
5 01 01 2.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	252.171.040	297.904.020	118,14%	250.985.000	250.985.000	100%
5 01 01 2.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	49.770.000	18.740.000	37,65%	42.440.000	42.440.000	100%
5 01 01 2.09 0009	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	42.640.000	75.409.318	176,85%	49.982.700	49.982.700	100%
5 01 02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	2.821.172.600	787.533.950	27,92%	3.851.124.650	3.851.124.650	100%
5 01 02 2.01	Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	704.516.100	663.698.150	94,21%	720.103.550	720.103.550	100%
5 01 02 2.01 0002	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	116.949.850	107.564.800	91,98%	119.955.800	119.955.800	100%
5 01 02 2.01 0005	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan PPAS	116.350.200	104.788.400	90,06%	119.969.800	119.969.800	100%
5 01 02 2.01 0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan	347.604.900	331.093.800	95,25%	349.969.850	349.969.850	100%

	Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD						
5 01 02 2.01 8	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	123.611.150	120.251.150	97,28%	130.208.100	130.208.100	100%
5 01 02 2.02	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	40.718.600	14.831.000		62.031.000	62.031.000	100%
5 01 02 2.02 0001	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	4.000.000	3.831.000	95,78%	24.998.000	24.998.000	100%
5 01 02 2.02 2	Penyusunan Petunjuk Teknis Administrasi Keuangan yang berkaitan dengan Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Penatausahaan dan Pertanggungjawaban Sub Kegiatan	36.718.600	11.000.000	29,96%	37.033.000	37.033.000	100%
5 01 02 2.03	Kegiatan Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	75.937.900	37.004.800	48,73%	68.990.100	68.990.100	100%
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi Pelaksanaan Akutansi Penerimaan dan Pengeluaran kas Daerah	7.888.000	1.903.200	24,13%	6.505.800	6.505.800	100%
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi laporan Keuangan SPD,BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	37.828.000	29.453.350	77,86%	48.342.550	48.342.550	100%
5 01 02 2.03 0003	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Propinsi dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	21.330.050	5.648.250	26,48%	14.141.750	14.141.750	100%
5 01 02 2.03 0003	Penyusunan Kebijakan dan Panduan Teknis Operasional Penyelenggaraan Akutansi Pemerintah Daerah	8.891.850	0	0,00%	-	-	

5 01 02 2.04	Kegiatan Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	2.000.000.000	72.000.000	3,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	100%
5 01 02 2.04 0001	Pengelolaan Dana Darurat	2.000.000.000	72.000.000	3,60%	3.000.000.000	3.000.000.000	100%
5 01 03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	1.836.557.297	354.064.098	19,28%	1.162.477.700	1.162.477.700	100%
5 01 03 2.01	Kegiatan Pengelolaan Barang Milik Daerah	1.836.557.297	354.064.098	19,28%	1.162.477.700	1.162.477.700	100%
5 01 03 2.01 0007	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	14.560.050	7.023.050	48,24%	14.907.500	14.907.500	100%
5 01 03 2.01 0008	Penatausahaan Barang Milik Daerah	56.117.300	51.330.400	91,47%	138.810.900	138.810.900	100%
5 01 03 2.01 0008	Pengamanan Barang Milik Daerah	1.522.770.197	193.280.542	12,69%	774.860.000	774.860.000	100%
5 01 03 2.01 0008	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Daerah	222.890.300	95.688.006	42,93%	211.803.100	211.803.100	100%
5 01 03 2.01 0008	Penyusunan Standar Harga	14.267.650	3.933.350	27,57%	17.132.200	17.132.200	100%
5 01 03 2.01 0008	Rekonsiliasi dalam Rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	5.951.800	2.808.750	47,19%	4.964.000	4.964.000	100%
5 05 02	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	389.093.950	352.319.529	90,55%	369.305.350	369.305.350	100%
5 05 02 2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	389.093.950	352.319.529		369.305.350	369.305.350	100%
5 05 02 2.01 0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	127.934.850	177.566.479	138,79%	175.033.400	175.033.400	100%
5 05 02 2.02 0003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	58.591.800	44.525.550	75,99%	46.273.000	46.273.000	100%
5 05 02 2.03 0002	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan (PBB P2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	94.041.500	79.200.750	84,22%	97.194.750	97.194.750	100%

5	05	02	2.04 0001	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	108.525.800	51.026.750	47,02%	50.804.200	50.804.200	100%
---	----	----	-----------	--	-------------	------------	--------	------------	------------	------

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan hasil evaluasi Keuangan ada beberapa sub kegiatan yang persentase capaian realisasinya masih di bawah 70% karena secara garis besar pada tahu 2024 kita seluruh Perangkat Daerah yang ada di kota Padang Panjang di minta untuk melakukan efisiensi sementara seluruh kegiatan secara fisik harus di selesaikan 100% sesuai dengan yang telah di targetkan di awal tahun Perencanaan

2.3 Analisis Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Penyelenggaraan tugas Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah melaksanakan fungsi sebagai Lembaga Teknis Penunjang Keuangan di Kota Padang Panjang, yang melaksanakan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 32 Tahun 2024 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Sistem Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang.

Dalam melakukan analisis terhadap kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang, mengacu pada indikator-indikator yang tercantum pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026. Analisis ini salah satunya dilakukan terhadap target dan realisasi indikator Tujuan dan Sasaran, target evaluasi capaian kinerja sasaran . Disamping itu juga dilakukan pengukuran terhadap capaian indikator Standar Pelayanan Minimal (SPM) dan Indikator Kinerja Kunci yang sudah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah dan RPJMD Kota Padang Panjang Tahun 2024 - 2026 sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 2.3

Pencapaian Kinerja Pelayanan Badan Pengelola Keuangan Daerah

Kota Padang Panjang

No	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Target NSPK	Target IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi tahun ke-		Proyeksi	
				2024	2025	2026	2027	2024	2025	2026	2027
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	Rasio PAD terhadap Pendapatan Daerah			18,22	18,5	18,6	18,7	18,22			
2	Rasio Belanja Urusan Pemerintahan Umum (Dikurangi transfer expenditures)			83,98	89,77	89,67	89,57	83,98			
3	Opini laporan Keuangan		IKK	WTP	WTP	WTP	WTP	WTP			
4	Indeks Pengelola Keuangan Daerah		IKK	63,2	64,46	65,73	66,99	63,2			
5	Budget Execution : Deviasi Realisasi Belanja Terhadap Belanja Total dalam APBD		IKK	2,52	8,902	8,802	8,702	2,52			
6	Revenue mobilization : Deviasi Realisasi PAD terhadap anggaran PAD dalam APBD		IKK	13,5	7,10	7,08	7,08	13,9			
7	Manajemen Aset		IKK	100	100	100	100	100			
8	Rasio Anggaran Sisa Terhadap total Belanja dalam APBD tahun sebelumnya		IKK	7,7	3,93	3,91	3,9	7,77			

Berdasarkan tabel kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang terlihat bahwa sebagian besar target tahun 2024 telah tercapai dan konsisten pada tahun berikutnya kemudian Rasio PAD stabil di 18,22%, Belanja urusan pemerintahan umum terealisasi mendekati target (sekitar 82%) sementara Opini laporan keuangan mempertahankan predikat WTP dan Indeks Pengelola Keuangan, Deviasi eksekusi anggaran serta manajemen aset juga sesuai target yaitu menunjukkan upaya efisiensi dan tata kelola keuangan berjalan baik

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas Dan Fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah

Isu-isu strategis pembangunan merupakan sejumlah tantangan nyata pembangunan, yang eksistensinya memberikan potret tentang perbedaan antara kondisi saat ini dengan cita-cita yang ingin dicapai sesuai pernyataan visi.

Isu-isu strategis pembangunan tersebut harus diintervensi secara baik

melalui strategi dan arah kebijakan pembangunan daerah di bidang perencanaan, dalam upaya pencapaian visi dan misi BPKD maupun Visi dan Misi pembangunan daerah

Penentuan isu-isu strategis dalam penyusunan Renstra menggunakan metode analisis SWOT. Analisis ini memperhatikan kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman. Untuk itu BPKD sebagai instansi pengelola keuangan daerah perlu mengetahui kondisi-kondisi elemen internal yang sifatnya Controllable (dapat dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor kekuatan dan kelemahan serta mengenal kondisi-kondisi elemen external yang sifatnya uncontrollable (yang relatif kurang dikuasai) yang berguna untuk mengetahui faktor peluang dan ancaman dengan menggunakan pendekatan analisis

Analisis Lingkungan Internal dan Eksternal, sebagai berikut :

Dalam Pengelolaan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah tahun sebelumnya, yaitu tahun 2024 – 2026, maka harus di perhatikan faktor internal seperti kelemahan, kekuatan, peluang dan ancaman guna menentukan langkah-langkah kedepan.

Tabel. 2.4

KELEMAHAN, KEKUATAN, PELUANG DAN ANCAMAN

KELEMAHAN		KEKUATAN	
(1)	Kurangnya peremajaan SDM yang berkualitas sesuai dengan spesifikasi teknis pengelolaan pendapatan, keuangan dan aset daerah.	(1)	Tersedianya Perda, Perwal dan Keputusan Gubernur tentang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah
(2)	Reward dan Punishment belum disesuaikan dengan kondisi yang sebenarnya berdasarkan ukuran kinerja.	(2)	Pengalaman empirik dari Sumberdaya Manusia dibidang pendapatan, pengelolaan keuangan dan aset daerah.
(3)	Jarang mengikuti diklat fungsional perpajakan, pengelolaan keuangan dan Aset Daerah		

(4) Sarana dan prasarana belum sesuai dengan standar pelayanan minimal yang telah ditentukan.	(3) Tersedianya dana yang cukup untuk melaksanakan fungsi pengelolaan keuangan daerah. (4) Kesiapan SDM dalam melaksanakan tugas tidak terbatas oleh jam kerja yang ditetapkan dalam peraturan Walikota Sikap tenggang rasa dari sesama aparat cukup tinggi.
Peluang	Ancaman
(1) Laju pertumbuhan Ekonomi selama beberapa tahun lalu menunjukan angka positif dan progresif. (2) Potensi Wajib Pajak dan Retribusi mengalami tren kenaikan yang positif. (3) Pusat Kegiatan Wilayah menjadi daya magnet terhadap hak dan kewajiban daerah	(1) Fluktuasi ekonomi makro semakin tidak jelas yang berdampak pada ekonomi mikro (2) Ketidaksabaran masyarakat dalam menghadapi globalisasi (3) Kebebasan dalam mengakses informasi keuangan melalui dunia maya. (4) Perubahan aturan yang cepat mendorong penata usahaan keuangan tidak sesuai dengan kondisi yang ada (5) Pekerjaan bertumpuk dalam waktu bersamaan

Jika kita lihat pada akar permasalahan sehingga Belum terlaksananya tugas dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah secara optimal dikarenakan adanya beberapa permasalahan dan hambatan, antara lain :

Tabel 2.5
Pemetaan Permasalahan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
1.	Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah belum optimal	Laporan-Laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian Kinerja Pemerintah Daerah	Koordinasi antar Perangkat Daerah terkait 6 dimensi yang menjadi point dalam Penilaian Indeks Pengelola Keuangan Daerah yang belum berjalan dengan baik	

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah	Ket.
2.	Terwujudnya Pengelolaan Keuangan Daerah yang akurat dan berkualitas	Perubahan Aturan terkait Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan Peraturan maupun ketentuan Perundang – undangan yang berlaku	Mensosialisasikan kepada seluruh Perangkat Daerah terkait dengan perubahan-perubahan aturan terkait laporan Keuangan Batasan waktu penyerahan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	

Sumber : BPKD Kota Padang Panjang

Berdasarkan analisis dan Penjabaran akara permasalahan di atas, maka isu-isu strategis yang perlu mendapat perhatian dan penanganan serius dalam pelaksanaan tugas dan fungsi BPKD 3 (tiga) tahun ke depan, adalah :

1. Peningkatan Kinerja Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di bidang keuangan daerah

Didalam Pelaksanaan Peningkatan Peningkatan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah adalah dengan meningkatkan kinerja di bidang Pemerintah Daerah baik itu berupa Laporan-laporan yang berkaitan dengan bobot penilaian kinerja penyelenggaraan Pemerintah daerah , Peningkatan Pendapatan asli Daerah dan juga dalam hal penganggaran

2. Peningkatan dan Pengembangan pengelolaan PAD

Di dalam Peningkatan dan pengembangan Pengelolaan PAD yang menjadi permasalahan yang harus ditindak lanjuti adalah objek/ Wajib Pajak yang tidak mau membayar Pajak atau menyetorkan Pajak sesuai dengan nominal seutuhnya, karena jika hal ini tidak di tindak lanjuti secara serius akan mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah

Jika Kita lihat pada Isu strategis pembangunan Kota Padang Panjang untuk penentuan kebijakan perencanaan pembangunan sebagaimana tertuang dalam Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029 sebagaimana kita lihat pada tabel berikut:

Tabel 2.6
Isu-isu Strategis Pembangunan Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Isu Utama	Isu Strategis
1	Isu Pembangunan Manusia	a. Peningkatan kualitas pendidikan masyarakat b. Peningkatan derajat kesehatan masyarakat c. Kesenjangan akses, partisipasi, kontrol dan manfaat yang dialami perempuan dalam merasakan manfaat pembangunan d. Peningkatan daya saing kepemudaan dan prestasi keolahragaan
2	Isu Tata Kelola Pemerintahan	a. Implementasi 8 area perubahan Reformasi Birokrasi
3	Isu Pembangunan Ekonomi	a. Peningkatan pertumbuhan sektor unggulan daerah b. Masih rendahnya nilai Investasi c. Penurunan angka kemiskinan dan pengangguran d. Rendahnya pendapatan masyarakat
4	Isu Tatahan Kehidupan Masyarakat	a. Mulai luntarnya nilai-nilai Adat dan Budaya di tengah masyarakat b. Masih terbatas pemahaman masyarakat dalam pengamalan nilai-nilai keagamaan c. Belum optimalnya layanan ketentraman dan ketertiban umum d. Penyelenggaran layanan kesejahteraan sosial
5	Isu kualitas infrastruktur dan lingkungan hidup	a. Layanan infrastruktur dasar b. Kesesuaian pemanfaatan ruang c. Kualitas air, udara, tutupan lahan

Sumber: Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026

2.5 Reviu Terhadap Rancangan Awal RKPD

Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah disusun dengan mengacu pada rancangan awal RKPD. Mengingat keterbatasan kapasitas keuangan berdasarkan perhitungan proyeksi kondisi keuangan Kota Padang Panjang pada rancangan awal RKPD, maka ada beberapa program dan kegiatan pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah dijadikan program dan kegiatan prioritas kedua. Untuk lebih

jelasnya review terhadap rancangan awal RKPD Tahun 2026. Kota Padang Panjang dapat dijelaskan melalui Tabel 2.7.

Tabel 2.7
Review terhadap Rancangan Awal RKPD Tahun 2026
Kota Padang Panjang

Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Rancangan Awal RKPD 2026					Hasil Analisis Kebutuhan (sesuaikan dengan PI)					SELISH	Catatan Penting
	Program/ Kegiatan/Subkegiatan	Lokasi	Indikator kinerja	Target capaian	Pagu indikatif (Rp.000)	Program/ Kegiatan/Sub kegiatan	Indikator Kinerja	Lokasi	Target capaian	Kebutuhan Dana (Rp.000)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
	BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH				11,371,734,853					11,371,734,853		
	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN				11,371,734,853					11,371,734,853		
	Keuangan				11,371,734,853					11,371,734,853		
X.XX.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	100,00%	8,305,310,000	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN /KOTA	Persentase pemenuhan urusan penunjang pada Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah	Kota Padang Panjang	100,00%	8,305,310,000		
X.XX.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah	100%	7,379,840,000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi keuangan perangkat daerah		100 Persen	7,379,840,000		
X.XX.01.2.02.00.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	630 Orang/bulan	7,338,800,000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kota Padang Panjang	644 Orang/bulan	7,338,800,000	1	

X.XX.01 .2.02.00 02	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	1 Dokumen	41,040,000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/ Verifikasi keuangan SKPD	Kota Padang Panjang	1 Dokumen	41,040,000		
X.XX.01 .2.05	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan layanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	100%	508.000.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah		91 Persen	508.000.000		
X.XX.01 .2.05.00 02	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	7 Paket	5,0000,000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	7 Paket	5,0000,000		
X.XX.01 .2.06	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	45 Paket	60.000.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	9 Paket	60.000.000		
X.XX.01 .2.06.00 01	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kota Padang Panjang	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	11.000.000	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	8 Paket	11.000.000		
X.XX.01 .2.06.00 04	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	462 laporan	120.000.000	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kota Padang Panjang	462 Laporan	120.000.000		
X.XX.01 .2.06.00 05	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100%	90.000.000	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan		100 Persen	90.000.000		
X.XX.01 .2.06.00 09	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	-	0	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	Kota Padang Panjang	6 Unit	0		

	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	1 Unit	90.000.000	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	Kota Padang Panjang	1 Unit	90.000.000		
X.XX.01.2.07	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100%	479,470.000	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi		100 Persen	479,470.000		
X.XX.01.2.07.00.02	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	3 Laporan	1.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kota Padang Panjang	3 Laporan	1.000.000		
X.XX.01.2.07.00.05	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	60 laporan	125.000.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kota Padang Panjang	60 Laporan	125.000.000		
X.XX.01.2.07.00.06	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan	353,470,000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kota Padang Panjang	2 Laporan	353,470,000		
X.XX.01.2.08	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100%	305.691.600	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik		90 Persen	305.691.600		
X.XX.01.2.08.00.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kota Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	2 Unit	55,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Padang Panjang	2 Unit	55,000,000		

						Kendaraan Dinas Jabatan						
X.XX.01 .2.08.00 01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Kota Padang Panjang	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	19 unit	75,000,000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operaional atau Lapangan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas Lapangan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Padang Panjang	19 unit	75,000,000		
X.XX.01 .2.08.00 02	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	56 Unit	25.000.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kota Padang Panjang	56 Unit	25.000.000		
X.XX.01 .2.08.00 04	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Kota Padang Panjang	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	5.000.000	Pemeliharaan /Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kota Padang Panjang	1 Unit	5.000.000		
X.XX.01 .2.09	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjanga Guru yang dialokasikan melalui TKD	40%	2,899,029,550	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjanga Guru yang dialokasikan melalui TKD	Kota Padang Panjang	40%	2,899,029,550		
			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Palayanan Publik	40%			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Palayanan Publik		40%			
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	20%			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar		20%			

			Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu	100%			Persentase Laporan keuangan Tepat Waktu		100%			
X.XX.01.2.09	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Kota Padang Panjang	Penyusunan APBD/ APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	41,434,250	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/ waktu maupun ketentuan lainnya		Tepat Waktu	41,434,250		
X.XX.01.2.09.00.11	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	7,049,500	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	7,049,500		
5.01.02	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	2 Dokumen	6,419,500	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	Kota Padang Panjang	2 Dokumen	6,419,500		
5.01.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	6 dokumen	16,933,850	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Kota Padang Panjang	6 Dokumen	16,933,850		
5.01.02.2.01.00.02	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Kota Padang Panjang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	4 Dokumen	11,031,400	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang	Kota Padang Panjang	4 Dokumen	11,031,400		

						Penjabaran Perubahan APBD						
5.01.02.2.01.00.05	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	7,896,000	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Kota Padang Panjang	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	88%	7,896,000		
5.01.02.2.01.00.02	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	7,896,000	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	6 Dokumen	7,896,000		
5.01.02.2.02.00.01	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	46,699,300	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Tepat Waktu	46,699,300		
5.01.02.2.03	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3,585,200	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	8 Laporan	3,585,200		

5.01.02.2.03.003	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	37,971,700	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	7 Laporan	37,971,700		
5.01.02.2.04	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8,142,400	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Kota Padang Panjang	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	2 Dokumen	8,142,400		
5.01.03	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	2.000.000.000	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100,00%	2.000.000.000		
5.01.03.2.01.007	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	1 Laporan	2.000.000.000		

5.01.03.2.01.00.08	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	800.000.000	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	1 Laporan	800.000.000		
5.01.03.2.01.00.08	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10%	1.295.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10%	1.295.000.000		
5.01.03.2.02	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100%	1.295.000.000	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu		100 Persen	1.295.000.000		
5.01.03.2.02.00.08	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Standar Harga	Kota Padang Panjang	Jumlah Standar Harga yang Disusun	2 Dokumen	5.000.000		
5.01.03.2.02.00.09	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.000.000	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	2 Dokumen	5.000.000		
5.01.03.2.03.00.010	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.000.000	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.000.000		
5.01.03.2.03.00.011	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 laporan	29,250,000	Pengamanan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	1 Laporan	29,250,000		
5.01.03.2.03.00.012	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan	4 Dokumen	29,662,500	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanganan, Pemusnahan,	4 Dokumen	29,662,500		

			Penghapusan Barang Milik Daerah			Barang Milik Daerah		dan Penghapusan Barang Milik Daerah				
5.01.03.2.03.00.013	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 laporan	5.000.000	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	2 Laporan	5.000.000		
5.05.02.2.01	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	24,83%	290.178.476	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH	Kota Padang Panjang	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	24,83%	290.178.476		
			Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	14 OPD				Cakupan Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Pendapatan	14 OPD			
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%				Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100%			
5.05.02.2.01.00.02	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	136,7 M	290.178.476	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Daerah dari Pajak Daerah		136,7 M	290.178.476		
5.05.02.2.02	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	1dokumen	6.000.000	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	9 Dokumen	6.000.000		

5.05.02.2.02.003	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	29,502,803	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	2 Laporan	29,502,803		
5.05.02.2.03	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	14000 Obyek pajak	23,700,000	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Kota Padang Panjang	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	400 Obyek Pajak	23,700,000		
5.05.02.2.03.002	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	29,280,000	Pengendalian , Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Kota Padang Panjang	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	72 Dokumen	29,280,000		

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Pada Badan Pengelola Keuangan Daerah tidak Usulan terhadap Program dan Kegiatan Masyarakat

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Pada Tahun 2026 ini kita kita **Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045**" Tema ini mencerminkan komitmen pemerintah untuk memulai transformasi besar sebagai fondasi menuju 100 tahun kemerdekaan Indonesia RPJMN 2025–2029 merupakan tahap awal pelaksanaan RPJPN 2025–2045. Terdapat **8 prioritas nasional** yang menjadi arah utama pembangunan:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan HAM
2. Memantapkan pertahanan dan kemandirian bangsa (termasuk swasembada pangan, energi, air, ekonomi syariah, digital, hijau, dan biru)
3. Melanjutkan pembangunan infrastruktur & penciptaan lapangan kerja
4. Penguatan SDM dan sains-teknologi (termasuk pendidikan, kesehatan, gender, pemuda, dan disabilitas)
5. Hilirisasi industri berbasis sumber daya alam
6. Pembangunan dari desa dan bawah (untuk pemerataan ekonomi dan pengentasan kemiskinan)
7. Reformasi politik, hukum, dan birokrasi (termasuk pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyelundupan)
8. Harmoni sosial dan lingkungan hidup (termasuk toleransi antarumat beragama dan pelestarian budaya)

Dalam rangka mendukung Tema Pembangunan Nasional serta Major Project dalam RKP Tahun 2024 serta arah kebijakan dan prioritas pembangunan Kementerian Keuangan maka kebijakan dan langkah strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Pada Rencana Kerja Perubahan 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Pengelolaan Keuangan daerah;
2. Peningkatan dan Pengembangan Pengelolaan PAD;
3. Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah di Bidang Keuangan Daerah

3.2 Tujuan dan Sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Dalam rangka pencapaian target kerja untuk lima tahun ke depan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang perlu menetapkan tujuan sebagai langkah awal pelaksanaan tugas.

TUJUAN

Yang Menjadi tujuan kedepan oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah dengan indikator :

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
4. Nilai Pendapatan Asli Daerah

SASARAN

Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka ada beberapa sasaran dan Indikator yang akan dicapai oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah yaitu

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator nya Opini BPK
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan Aset OPD
3. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dengan indikator Persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah
4. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah dengan indikator Nilai AKIP Badan Pengelola Keuangan Daerah

3.3 Program Dan Kegiatan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah

Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Pada Renja Tahun 2026 antara lain adalah :

1. Penetapan tujuan dan sasaran strategis yang dituangkan dalam Rencana Pembangunan jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029.
2. Penetapan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029
3. Evaluasi Pelaksanaan RPJMD tahun kelima, serta Renja BPKD sampai dengan Tahun 2023.
4. Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan fungsi dan kewenangan Badan Pengelolaan Keuangan Daerah

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Masih terdiri dari 4 Program yaitu Program Pengelolaan Keuangan Daerah, Program Pengelolaan Pendapatan Daerah, Program Pengelolaan Barang Milik Daerah dan Program Pelayan Administrasi Perkantoran dan 12 Kegiatan namun sebelum Perubahan pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Memiliki 32 Sub kegiatan guna mendukung seluruh sasaran Maupun Tujuan yang telah ditetapkan pada Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2025 – 2029 Pada Tahun 2025 sub kegiatan Penyusunan Petunjuk teknis administrasi keuangan tidak dilaksanakan karena Sub Kegiatan telah selesai 100% namun pada Tahun 2026 ini ada satu sub kegiatan yang muncul yaitu Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas/ Jabatan . Untuk lebih jelasnya dapat kita lihat rincian Program, kegiatan maupun sub kegiatan serta Target yang akan di capai pada Tahun 2026 pada Tabel 3.1 dibawah ini :

Tabel 3.1
Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2026
Dan Prakiraan Maju Tahun 2027
Kota Padang Panjang
Badan Pengelola Keuangan Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Renstra 2026	Renja 2026
1	Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah				
		Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah	Opini BPK	WTP	WTP
		Meningkatnya Pengelolaan Aset daerah	Persentase Pengelolaan aset OPD	20%	20%
		Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah	persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah	75%	75%

		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai Akip Badan Pengelola Keuangan Daerah	70%	70%
--	--	---------------------------------------	--	-----	-----

Berdasarkan Tabel 3.1 yang memuat tujuan, sasaran dan indikator rencana kerja pemerintah daerah kota Padang Panjang tahun 2026 pada Badan Pengelola Keuangan Daerah Adalah Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan, aset daerah dan Pendapatan asli daerah dengan indikator :

1. Rasio Pajak Daerah terhadap PDRB
2. Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah
3. Indeks Pengelolaan Aset Daerah
4. Nilai Pendapatan Asli Daerah

Dengan sasaran:

1. Meningkatnya kualitas pengelolaan keuangan daerah dengan indikator nya Opini BPK
2. Meningkatnya Pengelolaan Aset Daerah dengan indikator Persentase Pengelolaan asset OPD
3. Meningkatnya Pendapatan Asli Daerah dengan indikator persentase masyarakat Dalam melaksanakan kewajiban membayar Pajak daerah dan retribusi daerah
4. Meningkatnya kinerja perangkat daerah dengan indikator Nilai AKIP OPD

Untuk mendukung pencapaian terhadap Tujuan dan Sasaran Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2026 yaitu didukung oleh 4 Program, 9 kegiatan dan 34 Sub kegiatan dengan total pagu sebesar Rp. 11,371,734,853. Dengan Tujuan sampai dengan Sub kegiatan yang telah kami sampaikan diatas kami bertekad untuk melakukan seluruh hal-hal yang menjadi target pencapaian kami secara keseluruhan dengan tetap mengupayakan efisiensi secara anggaran yang telah kami tetapkan

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN BADAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Dalam mewujudkan tujuan dan sasaran Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagaimana telah diuraikan sebelumnya, maka dirumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya, yang akan dilaksanakan pada tahun 2026. Dalam merumuskan program, kegiatan, dan sub kegiatan beserta indikatornya tersebut terdapat beberapa pertimbangan yang perlu diperhatikan, yaitu antara lain:

1. Mempedomani RKPD Kota Kota Padang Panjang Tahun 2026 serta Review Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025-2029;
2. Mendukung pencapaian Tujuan dan sasaran Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2025 - 2029, yang dijabarkan dalam tujuan dan sasaran pembangunan daerah Kota Kota Padang Panjang Tahun 2026. Secara umum Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota padang Panjang bertugas menkoordinasikan pencapaian 4 (indikator) indikator tujuan yaitu : “Indeks Pengelola Keuangan Daerah , Rasio Pajak daerah terhadap PDRB dan Indeks Pengelolaan Aset Daerah, Nilai Pendapatan Asli Daerah ;
3. Keserasian dan keterpaduan pembangunan baik perencanaan pembangunan perekonomian, pemerintahan dan pembangunan manusia, penelitian pengembangan inovasi dan pengendalian daerah, serta infrastruktur pengembangan wilayah dalam kerangka pembangunan daerah Kota Padang Panjang;
4. Ketersediaan data dan informasi kebutuhan penyusunan rumusan kebijakan perencanaan pembangunan daerah;
5. Program dan kegiatan yang direncanakan harus dapat merespon isu-isu strategis Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang
6. Penerapan anggaran berbasis kinerja dalam rangka peningkatan efisiensi dan efektifitas pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan;
7. Sumber pendanaan yang dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program /kegiatan/sub kegiatan pembangunan, dengan mengikuti aturan yang berlaku.
8. Secara rinci rumusan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 sebagaimana table 4.1 berikut :

Tabel 4.1
Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (Renja OPD)
Badan Pengelola Keuangan daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026

N O	KODE	URUSAN / BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	TARGE T AKHIR PERIO DE RENST RA OPD	REALIS ASI CAPAIA N RENJA OPD TAHUN 2024	PRAKIR AAN CAPAIA N TARGET RENJA OPD TAHUN 2025	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOM POK SASAR AN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2027		PERANGK AT DAERAH PENANG GUNG JAWAB
							TARGE T 2026	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKAS I	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARG ET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASION AL	DAERA H				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH						11.371.734.853							12.154.812.590,00	BPKD
	5	UNSUR PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN						11.371.734.853							12.154.812.590,00	BPKD
	5.02	KEUANGAN						11.371.734.853							12.154.812.590,00	BPKD
1,	5,02,01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN		-				8.305.310.000						-	8.632.460.790,00	BPKD

		DAERAH KABUPATEN/KOTA														
		Meningkatnya akuntabilitas kinerja perangkat daerah	Persentase pemenuhan urusan penunjang yang dipenuhi pada Badan Pengelola Keuangan Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	8.305.310.000	-	-	-	-	-	100 Perse n	8.632.460.790,00	BPKD
	5.02.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Pemenuhan Layanan administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	7.379.840.000			Memper kuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	6.917.971.590,00	BPKD

	5.02.01.2.02 .0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	3780 Orang/bulan	630 Orang/bulan	630 Orang/bulan	630 Orang/bulan	7.338.800.000	Kota Padang Panjang , Padang Panjang Barat, Semua Kel/Desa	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		6.866.931.590,00	BPKD
	5.02.01.2.02 .0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	60 Dokumen			12 Dokumen	41.040.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pem	-		51.040.000,00	BPKD

											pan .	erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase pemenuhan layanan administrasi umum perangkat daerah	100 %	100 %	100 %	100 %	196.000.000			Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i	-	-	515.488.000,00	BPKD

	5.02.01.2.06 .0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerang an Bangunan Kantor yang Disediakan	42 Paket	7 Paket	7 Paket	7 Paket	5.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PAJAK BARANG DAN JASA TERTEN TU (PBJT)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		15.488.000,00	BPKD
	5.02.01.2.06 .0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	54 Paket	9 Paket	9 Paket	9 Paket	60.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem	-		70.000.000,00	BPKD

											pan	erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i					
	5.02.01.2.06 .0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	48 Paket	8 Paket	8 Paket	8 Paket	11.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		0.000,00	30.00	BPKD
	5.02.01.2.06 .0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggara an Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	2360 Laporan	462 Laporan	256 Laporan	256 Laporan	120.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan,	PENDAP ATAN TRANSF ER	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan	-		400.000.000,00		BPKD

									Semua Kel/Des a		, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pemenuhan Barang Milik Daerah sesuai dengan perencanaan	100 %	100 %	100 %	100 %	90.000.000			Memper kuat reforma si politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran,	-	-	190.000.000,00	BPKD

												Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				
	5.02.01.2.07.0001	Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan	8 Unit	0 Unit	1 Unit	1 Unit	90.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan .	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-		90.000.000,00	BPKD
	5.02.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	52 Unit	12 Unit	4 Unit	0 Unit	0	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegakan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih,	-		100.000.000,00	BPKD

											dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				
	5.02.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang terpenuhi	100 %	100 %	100 %	100 %	479.470.000			Memperkuat transformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan	-	-	693.000.000,00	BPKD

												Melayan i				
	5.02.01.2.08 .0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	18 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	1.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		5.000.000,00	BPKD
	5.02.01.2.08 .0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	360 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	60 Laporan	125.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih,	-		163.000.000,00	BPKD

											dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.01.2.08 .0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	353.470.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan	-		525.000.000,00	BPKD

												Melayan i				
	5.02.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase ketersediaan barang milik daerah berkondisi baik	100 %	100 %	100 %	100 %	160.000.000			Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i	-	-	316.001.200,00	BPKD
	5.02.01.2.09 .0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Dinas atau Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	33 Unit	23 Unit	23 Unit	2 Unit	130.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	OPSEN PAJAK KENDAR AAN BERMOT OR (PKB)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab	-		180.000.000,00	BPKD

											pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	el Serta Berkualit as Terwujudny a Tata Kelola Pem erintah n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.01.2.09 .0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	336 Unit	56 Unit	56 Unit	56 Unit	25.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludupan .	Mewujudka n Tata Kelola Pem erintah n Dan Pelayanan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwujudny a Tata Kelola Pem erintah n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan	-		43.490.000,00	BPKD

												Melayan i				
	5.02.01.2.09 .0009	Pemeliharaan/Re habilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	6 Unit	1 Unit	1 Unit	1 Unit	5.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		92.511.200,00	BPKD
2,	5,02,02	PROGRAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH		-				2.899.029.550						-	2.776.503.900,00	BPKD
		<i>Meningkatnya tata kelola anggaran, perbendaharaan , akuntansi dan pelaporan</i>	Persentase Belanja Pegawai di Luar Tunjangan Guru yang Dialokasikan melalui TKD	30%	47,3%	47%	40%	2.899.029.550						30 Perse n	2.776.503.900,00	BPKD

			Persentase Alokasi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik	40%	28%	30%	40%							40 Persen		BPKD
			Persentase Realisasi Anggaran Belanja Urusan Wajib Pelayanan Dasar	0,2	20%	20%	20%							20 Persen		BPKD
			Persentase Laporan Keuangan Tepat Waktu	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	-	100 Persen		BPKD
	5.02.02.2.01	Koordinasi dan Penyusunan Rencana Anggaran Daerah	Penyusunan APBD APBDP berdasarkan ketentuan baik secara tanggal/waktu maupun ketentuan lainnya	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	41.434.250			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transpa	-	-	716.323.500,00	BPKD

												ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i				
	5.02.02.2.01 .0001	Koordinasi dan Penyusunan KUA dan PPAS	Jumlah Dokumen KUA dan PPAS yang Disusun	12 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	049.500	7. Kota Padang Panjang . Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		118.290.400,00	BPKD
	5.02.02.2.01 .0002	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Jumlah Dokumen Perubahan KUA dan Perubahan PPAS yang Disusun	12 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	6.419.500	Kota Padang Panjang . Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih,	-		119.863.400,00	BPKD

											dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani				
	5.02.02.2.01.0007	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD	36 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	6 Dokumen	16.933.850	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyalahgunaan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan	-		349.154.500,00	BPKD

												Melayan i					
	5.02.02.2.01 .0008	Koordinasi dan Penyusunan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	Jumlah Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD	24 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokume n	11.031.400	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		129.015.200,00	BPKD	
	5.02.02.2.02	Koordinasi dan Pengelolaan Perbendaharaan Daerah	Realisasi pencairan anggaran tepat waktu sesuai RAK	82 %	82 %	83 %	82 %	7.896.000			Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egahan dan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel	-	-	0.000,00	61.83	BPKD

											pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i				
	5.02.02.2.02 .0009	Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	Jumlah Dokumen Hasil Rekonsiliasi Data Penerimaan dan Pengeluaran Kas serta Pemungutan dan Pemotongan atas SP2D dengan Instansi Terkait	36 Dokume n	2 Dokume n	6 Dokume n	6 Dokume n	7.896.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan	-		61.830.000,00	BPKD

												Melayan i				
	5.02.02.2.03	Koordinasi dan Pelaksanaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Daerah	Penyusunan Laporan Keuangan Daerah yang tepat waktu sesuai dan SAP	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	49.699.300			Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i	-	-	98.350.400,00	BPKD
	5.02.02.2.03 .0001	Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	Jumlah Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Akuntansi Penerimaan dan Pengeluaran Kas Daerah	48 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	8 Laporan	3.585.200	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab	-		6.553.400,00	BPKD

											pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i					
	5.02.02.2.03 .0004	Konsolidasi Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Keuangan SKPD, BLUD dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang Terkonsolidasi	42 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	7 Laporan	37.971.700	Kota Padang Panjang . Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan	-		0.000,00	78.00	BPKD

												Melayan i				
	5.02.02.2.03 .0005	Koordinasi dan Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawa ban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	Jumlah Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjaw aban Pelaksanaan APBD Kabupaten/Kota	12 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	8.142.400	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		13.797.000,00	BPKD
	5.02.02.2.04	Penunjang Urusan Kewenangan Pengelolaan Keuangan Daerah	Persentase kegiatan penunjang urusan kewenangan pengelolaan keuangan daerah yang dilaksanakan	100 %	100 %	100 %	100 %	2.800.000.000			Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokra si, serta memp erkuat penc egahan dan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akunta bel	-	-	1.900.000.000,00	BPKD

											pember ant asan korupsi, narkoba , judi, dan pe nyeludu pan .	Serta Berkuali tas Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesi onal, Transpa ran, Akunta bel, Inovatif, Respon sif dan Melayan i				
	5.02.02.2.04 .0008	Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	Jumlah Laporan Hasil Analisis Perencanaan dan Penyaluran Bantuan Keuangan	5 Laporan	Laporan	1 Laporan	1 Laporan	800.000.000	-	DANA ALOKASI UMUM (DAU)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan	-		900.000.000,00	BPKD

												Melayan i					
	5.02.02.2.04 .0009	Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	Jumlah Laporan Hasil Pengelolaan Dana Darurat dan Mendesak	5 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	1 Laporan	2.000.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		1.000.000.000,00	BPKD	
3,	5,02,03	PROGRAM PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH		-				78.912.500						-		470.494.000,00	BPKD
		Meningkatnya tata kelola aset daerah	Persentase Penambahan Nilai Aset Tetap	10 %	4% %	10 %	10 %	78.912.500	-	-	-	-	-	10 Perse n		470.494.000,00	BPKD

	5.02.03.2.01	Pengelolaan Barang Milik Daerah	Persentase ketepatan waktu pelaporan penyajian data BMD tepat waktu	100 %	100 %	100 %	100 %	78.912.500			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	470.494.000,00	BPKD
	5.02.03.2.01.0001	Penyusunan Standar Harga	Jumlah Standar Harga yang Disusun	12 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	2 Dokumen	5.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola	-		27.803.000,00	BPKD

											pan	Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i					
	5.02.03.2.01 .0003	Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah	12 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	2 Dokume n	5.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember antasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		5.000,00	16.63	BPKD

	5.02.03.2.01 .0005	Penatausahaan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		112.107.000,00	BPKD
	5.02.03.2.01 .0007	Pengamanan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pengamanan Barang Milik Daerah	18 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	3 Laporan	29.250.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem	-		93.670.000,00	BPKD

											pan .	erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.03.2.01 .0010	Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtangan an, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Optimalisasi Penggunaan, Pemanfaatan, Pemindahtanga nan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Daerah	24 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokume n	4 Dokume n	29.662.500	Kota Padang Panjang . Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		203.000.000,00	BPKD
	5.02.03.2.01 .0011	Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah	Jumlah Laporan Hasil Rekonsiliasi dalam rangka Penyusunan	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	5.000.000	Kota Padang Panjang . Semua Kecama tan,	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan	-		17.279.000,00	BPKD

			Laporan Barang Milik Daerah						Semua Kel/Des a		, serta memp erkuat penc egahan dan pember ant asan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan .	Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
4,	5,02,04	PROGRAM PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH		-				88.482.803						-	275.353.900,00	BPKD
		Meningkatnya penerimaan pendapatan daerah	Persentase PAD terhadap Pendapatan Daerah	31,81 %	16.18 %	16,28 %	24,83 %	88.482.803						26,53 Perse n	275.353.900,00	BPKD
			Cakupan pembinaan dan pengawasan pengelolaan pendapatan	14 OPD	14 OPD	14 OPD	14 OPD							14 OPD		BPKD
			Persentase Penerapan Sistem Informasi Keuangan Berbasis Digital	100 %	100 %	100 %	100 %	-	-	-	-	-	-	100 Perse n		BPKD

	5.02.04.2.01	Kegiatan Pengelolaan Pendapatan Daerah	Jumlah Pencapaian Pendapatan Asli Daerah	947,3 Rupiah	9,6 Rupiah	112,7 Rupiah	136,7 Rupiah	88.482.803			Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	-	275.353.900,00	BPKD
	5.02.04.2.01.0002	Analisa dan Pengembangan Pajak Daerah, serta Penyusunan Kebijakan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Analisis Pajak Daerah serta Pengembangan Pajak Daerah dan Kebijakan Pajak Daerah	54 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	9 Dokumen	6.000.000	Kota Padang Panjang, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi, serta memperkuat penegakan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyeludupan.	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola	-		44.942.000,00	BPKD

											pan	Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
	5.02.04.2.01 .0005	Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pendataan dan Pendaftaran Objek Pajak Daerah, Subjek Pajak dan Wajib Pajak Daerah	12 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	2 Laporan	29.502.803	Kota Padang Panjang , Semua Kecama tan, Semua Kel/Des a	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memper kua t reforma si politik, hukum dan birokrasi , serta memp erkuat penc egahan dan pember antasan korupsi, narkoba, judi, dan pe nyeludu pan	Mewuju dka n Tata Kelola Pem erintaha n Dan Pelayan an Publik Yang Bersih, Akuntab el Serta Berkualit as Terwuju dny a Tata Kelola Pem erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i	-		79.000.000,00	BPKD

5.02.04.2.01.0007	Penilaian Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)	Jumlah Objek Pajak yang Disesuaikan NJOP nya	10338 Obyek Pajak	14000 Obyek Pajak	400 Obyek Pajak	750 Obyek Pajak	23.700.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Profesional, Transparan, Akuntabel, Inovatif, Responsif dan Melayani	-	1.900,00	75.93	BPKD
5.02.04.2.01.0013	Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah	Jumlah Dokumen Hasil Pemeriksaan serta Pengendalian dan Pengawasan Pajak Daerah	432 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	72 Dokumen	29.280.000	Kota Padang Panjang , Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAP ATAN ASLI DAERAH (PAD)	Memperkuat reformasi politik, hukum dan birokrasi , serta memperkuat penegahan dan pemberantasan korupsi, narkoba, judi, dan penyaludupan	Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Dan Pelayanan Publik Yang Bersih, Akuntabel Serta Berkualitas Terwujudnya Tata Kelola Pem	-	75.480.000,00		BPKD

												pan .	erintaha n yang Profesio nal, Transpar an, Akuntab el, Inovatif, Respons if dan Melayan i				
--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	----------	---	--	--	--	--

BAB IV

PENUTUP

Terkait dengan penyiapan dan penyediaan dokumen pengelolaan keuangan ditingkat Perangkat Daerah, Badan Pengelola Keuangan Daerah telah menyusun dan menetapkan Renstra Badan Pengelola Keuangan Daerah Tahun 2025 - 2029 yang memuat Tujuan, sasaran, kebijakan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan selama 5 tahun kedepan sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Badan Pengelola Keuangan Daerah. Kemudian terkait dengan perencanaan tahunan daerah maka seluruh Perangkat Daerah perlu menyusun dan menetapkan Renja masing masing.

Sehubungan dengan ini maka Badan Pengelola Keuangan Daerah juga menyusun dan menetapkan Rancangan akhir Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah tahun 2026. Rancangan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah ini memuat hal-hal yang terkait dengan pelaksanaan Renja tahun lalu, permasalahan dan rumusan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan oleh pengguna anggaran dan pejabat pelaksana teknis kegiatan pada tahun yang akan datang.

Keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah ini sangat tergantung pada peran aktif seluruh jajaran pimpinan dan staf Badan Pengelola Keuangan Daerah. Untuk itu diperlukan sikap mental, tekad, semangat, dan kekuatan serta disiplin semua unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah, dengan cara memberi dukungan penuh terhadap pelaksanaan program serta kegiatan sesuai dengan fungsi dan kemampuan masing-masing.

Disamping itu, keberhasilan pelaksanaan Renja Badan Pengelola Keuangan Daerah juga sangat tergantung kepada keseriusan segenap unsur Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam menyiapkan peraturan-peraturan yang akan menjadi dasar hukum bagi pelaksanaan program dan kegiatan serta dalam penataan pengelolaan program dan kegiatan tersebut selama satu tahun yang akan datang, baik

Dari segi tata kelola sumber daya manusia, tata kelola anggaran yang telah dialokasikan maupun tata kelola peralatan/perengkapan. Diharapkan pada awal

tahun anggaran berjalan atau awal tahun 2026, seluruh kebutuhan pelaksanaan program/kegiatan tersebut sudah dapat diselesaikan.

Demikian Rancangan Awal Rencana Kerja Badan Pengelola Keuangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2026 disusun, semoga mampu meningkatkan kinerja Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun yang akan datang.

Padang Panjang, Agustus 2025



KEPALA BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH

Dr. WINARNO, SE, ME

NIP. 19740206 199903 1 003

WALI KOTA PADANG PANJANG

HENDRI ARNIS



